

Konsep Kebebasan Manusia Menurut Baruch Spinoza dalam Perspektif Filsafat Politik

Yulianus Patrisius Firman¹

¹Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang,
Indonesia

*firmanrizman4@gmail.com¹

Alamat: Jl. Terusan Rajabasa No. 2, Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur 65146
firmanrizman4@gmail.com¹

Abstract. *Discussions on human freedom in Spinoza's philosophy are generally dominated by metaphysical and ethical interpretations, while its systematic relevance to political philosophy remains insufficiently explored. This paper addresses this gap by situating Spinoza's concept of freedom within a political framework that connects rational self-determination with the structure of collective life. Employing a qualitative literature approach with analytical-philosophical methods, this study critically examines Spinoza's primary works—Ethics, Theological-Political Treatise, and Political Treatise—alongside selected secondary sources. The analysis demonstrates that freedom, in Spinoza's view, is constituted not by the absence of external constraints but by the capacity to act through adequate ideas grounded in reason. Such a conception redefines political freedom as the condition that enables individuals to participate rationally within a shared order. Furthermore, the findings indicate that democratic arrangements provide the most adequate space for the realization of rational freedom, as they facilitate participation, safeguard intellectual autonomy, and orient collective life toward common welfare. This paper contributes to political philosophy by clarifying the intrinsic relation between rational freedom and democratic order, while also offering a contextual reflection relevant to contemporary socio-political dynamics.*

Keywords: *Freedom, Happiness, Human, Politics, Reason*

Abstrak. Pembahasan mengenai kebebasan manusia dalam filsafat Spinoza umumnya didominasi oleh pendekatan metafisis dan etis, sementara keterkaitannya secara sistematis dengan filsafat politik masih belum banyak dielaborasi. Tulisan ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan konsep kebebasan Spinoza dalam kerangka politik yang menghubungkan determinasi diri rasional dengan struktur kehidupan bersama. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan analitis-filosofis melalui pembacaan kritis terhadap karya utama Spinoza—Ethics, Theological-Political Treatise, dan Political Treatise—serta didukung oleh sumber sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebebasan, menurut Spinoza, tidak terletak pada ketiadaan batas eksternal, melainkan pada kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan ide-ide yang memadai dan rasional. Konsepsi ini menegaskan bahwa kebebasan politik merupakan kondisi yang memungkinkan individu berpartisipasi secara rasional dalam tatanan bersama. Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem demokrasi menyediakan ruang paling memadai bagi aktualisasi kebebasan rasional, karena menjamin partisipasi, kebebasan berpikir, serta orientasi pada kesejahteraan bersama. Kontribusi tulisan ini terletak pada penegasan hubungan inheren antara kebebasan rasional dan tatanan demokratis, sekaligus menawarkan refleksi kontekstual bagi dinamika sosial-politik kontemporer.

Kata kunci: Akal budi, Kebahagiaan, Kebebasan, Manusia, Politik,

PENDAHULUAN

Kebebasan manusia merupakan salah satu tema fundamental dalam filsafat yang selalu mengalami perkembangan pemaknaan seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Gagasan mengenai kebebasan tidak hanya berkaitan dengan dimensi individual, tetapi juga menyentuh relasi manusia dengan struktur sosial dan politik yang melingkupinya. Pemahaman tentang kebebasan menentukan bagaimana manusia bertindak, mengambil keputusan, dan membangun kehidupan bersama. Kebebasan tidak sekadar dipahami sebagai hak, melainkan juga sebagai kemampuan yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk berakal budi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebebasan selalu memiliki relevansi yang kuat dalam refleksi filosofis maupun praksis kehidupan bernegara (Dister, 1991; Leahy, 2001).

Perkembangan pemikiran tentang kebebasan menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman yang bersifat negatif menuju pemaknaan yang lebih substantif. Kebebasan dalam pengertian negatif seringkali diartikan sebagai ketiadaan hambatan eksternal atau bebas dari intervensi pihak lain. Pemahaman ini cenderung menempatkan kebebasan sebagai kondisi tanpa batas yang memungkinkan individu bertindak sesuai kehendaknya. Pendekatan semacam ini seringkali menimbulkan problem ketika kebebasan individu berbenturan dengan kepentingan bersama. Pemaknaan yang lebih substantif kemudian melihat kebebasan sebagai kemampuan internal manusia untuk menentukan dirinya secara rasional. Perubahan cara pandang ini membuka ruang bagi pembacaan kebebasan yang lebih kompleks dan terarah (Bagus, 2005; Waskito, 2017).

Baruch Spinoza menawarkan pendekatan yang khas dalam memahami kebebasan manusia melalui penekanan pada rasionalitas. Kebebasan tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa sebab, melainkan sebagai tindakan yang lahir dari pemahaman yang memadai terhadap realitas. Manusia disebut bebas sejauh ia bertindak berdasarkan akal budi dan mampu memahami sebab-sebab yang menentukan tindakannya. Kebebasan dalam pengertian ini bersifat aktif dan menuntut kemampuan reflektif yang mendalam. Pemikiran tersebut sekaligus

mengkritik pandangan yang menempatkan kebebasan sebagai ekspresi kehendak yang tidak terarah. Spinoza menempatkan kebebasan sebagai bagian dari struktur ontologis dan epistemologis manusia (Spinoza, 2002; Kisner, 2011).

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas pemikiran Spinoza mengenai kebebasan dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan rekan-rekannya menyoroiti hubungan antara kebebasan, tanggung jawab moral, dan kehidupan berbangsa. Kajian lain yang dilakukan oleh Rika menekankan pentingnya pemahaman kausalitas dalam menjelaskan kebebasan manusia. Binsasi mengaitkan pemikiran Spinoza dengan pembentukan konsepsi negara melalui tokoh Soepomo. Ragam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Spinoza memiliki daya jangkau yang luas dalam berbagai bidang kajian. Keberagaman pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan kekayaan interpretasi terhadap konsep kebebasan yang ditawarkan oleh Spinoza (Raharjo et al., 2025; Rika, 2019; Binsasi, 2024).

Kecenderungan umum dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kebebasan Spinoza lebih banyak diletakkan dalam kerangka metafisis, etis, atau historis. Penekanan pada dimensi tersebut membuat relasi antara kebebasan rasional dan struktur politik belum dielaborasi secara mendalam. Analisis yang mengaitkan determinasi diri dengan praktik kehidupan bernegara masih terbatas dan belum dikembangkan secara sistematis. Kekosongan ini mengakibatkan pemikiran Spinoza belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kerangka teoritis dalam filsafat politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pembacaan yang lebih terintegrasi antara dimensi individual dan kolektif dari kebebasan. Ruang inilah yang membuka peluang bagi pengembangan kajian yang lebih komprehensif (Kisner, 2011; Suseno, 1997).

Kebebasan dalam filsafat politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana individu berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Kehidupan bernegara menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial. Gagasan kebebasan yang tidak terarah berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakteraturan dalam masyarakat. Pemahaman kebebasan sebagai determinasi diri rasional memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembentukan

tatanan politik yang stabil. Rasionalitas menjadi landasan penting dalam mengarahkan tindakan individu agar selaras dengan kepentingan bersama. Pemikiran ini menunjukkan bahwa kebebasan memiliki dimensi etis sekaligus politis yang tidak dapat dipisahkan (Spinoza, 1951; Waskito, 2017).

Demokrasi seringkali dipandang sebagai sistem yang paling memungkinkan terwujudnya kebebasan manusia. Sistem ini memberikan ruang bagi individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan pendapat secara terbuka. Kebebasan berpikir dan berbicara menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Tanpa landasan rasionalitas, kebebasan dalam demokrasi dapat berubah menjadi ekspresi emosional yang destruktif. Spinoza memberikan dasar filosofis bahwa kebebasan harus diarahkan oleh akal budi agar tidak menyimpang dari tujuan bersama. Pandangan ini memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kebebasan rasional dan kualitas kehidupan demokratis (Spinoza, 1951; Dedi Agus, 2021).

Realitas sosial-politik Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam praktik kebebasan. Perkembangan demokrasi menghadirkan ruang kebebasan yang semakin luas bagi masyarakat. Situasi tersebut juga diiringi dengan munculnya berbagai tantangan seperti disinformasi, politik identitas, dan polarisasi sosial. Kondisi semacam ini menuntut adanya landasan konseptual yang mampu mengarahkan praktik kebebasan agar tetap rasional dan bertanggung jawab. Pemikiran Spinoza menawarkan perspektif yang relevan untuk membaca persoalan tersebut secara lebih mendalam. Kebebasan yang didasarkan pada akal budi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Wingarta et al., 2021).

Kajian ini menempatkan konsep kebebasan manusia menurut Spinoza dalam perspektif filsafat politik dengan menekankan determinasi diri rasional sebagai fondasi kehidupan bersama. Analisis diarahkan pada upaya menjelaskan bagaimana kebebasan individu berkontribusi dalam membentuk tatanan politik yang rasional dan berkeadilan. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa kebebasan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Penekanan pada relasi antara kebebasan dan rasionalitas memperkaya

pembacaan terhadap filsafat politik Spinoza. Gagasan tersebut sekaligus memberikan kontribusi dalam memperluas kajian tentang kebebasan dalam diskursus akademik (Kisner, 2011; Suseno, 1997).

Pengembangan kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam literatur yang belum mengaitkan secara sistematis antara kebebasan rasional dan struktur politik. Pembacaan yang integratif memberikan peluang untuk memahami kebebasan sebagai prinsip yang membentuk sekaligus menjaga kehidupan bernegara. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan filsafat politik, khususnya dalam memahami relasi antara individu dan negara. Relevansi pemikiran Spinoza menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan sosial-politik yang kompleks. Upaya ini sekaligus menegaskan pentingnya filsafat sebagai dasar refleksi kritis dalam memahami dinamika kebebasan manusia (Spinoza, 2002; Kisner, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan corak analisis filosofis. Sumber data utama berupa karya-karya primer Baruch Spinoza, khususnya *Ethics*, *Theological-Political Treatise*, dan *Political Treatise*, yang dipilih karena secara langsung memuat gagasan tentang kebebasan, rasionalitas, dan kehidupan politik. Sumber sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkaya interpretasi dan memberikan kerangka dialogis terhadap pemikiran Spinoza. Pendekatan filosofis yang digunakan adalah analisis konseptual (*conceptual analysis*) untuk mengurai makna kebebasan sebagai determinasi diri rasional, serta pendekatan hermeneutik untuk memahami teks dalam keseluruhan struktur pemikiran Spinoza secara sistematis. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan penelusuran makna kebebasan tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dalam relasinya dengan keseluruhan sistem filsafat Spinoza (Kisner, 2011; Palmer, 2005).

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi filosofis, dan penarikan kesimpulan argumentatif. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian teks yang secara langsung berkaitan dengan konsep kebebasan dan rasionalitas. Kategorisasi

dilakukan dengan mengelompokkan konsep-konsep kunci seperti determinasi diri, akal budi, dan kebebasan politik. Tahap interpretasi diarahkan untuk menjelaskan hubungan internal antar konsep serta implikasinya dalam kerangka filsafat politik. Hasil interpretasi kemudian dikonstruksi secara argumentatif untuk menghasilkan pemahaman yang koheren mengenai kebebasan dalam pemikiran Spinoza. Prosedur ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2014; Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panorama Kebebasan Manusia

Secara etimologis kata kebebasan berasal dari bahasa Latin yakni *libertas*. Kata ini memiliki beberapa arti seperti; hak yang dimiliki seseorang untuk secara bebas memilih dari beberapa alternatif Tindakan tanpa dibatasi oleh otoritas, hak seseorang untuk tidak dicampur tangani oleh pihak lain dalam pencarian nilai atau kepemilikan atas apa yang diinginkannya. Di samping itu terdapat juga arti lainnya, seperti; hak individu untuk mengekspresikan diri sebagaimana yang mereka kehendaki tanpa tekanan dan untuk menggunakan cara-cara yang mereka inginkan demi memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Kata kebebasan juga diterjemahkan dari bahasa Inggris *freedom*. Lorens Bagus menerangkan beberapa definisi pokok mengenai kata *freedom* ini. Pertama, keadaan tidak dipaksa atau tidak ditentukan oleh sesuatu di luar, sejauh kebebasan disatukan dengan kemampuan definitif dari penentuan diri. Kedua, penentuan diri sendiri, pengendalian diri, pengaturan diri dan pengarahan diri. Ketiga, kemampuan untuk memilih dan kesempatan untuk memenuhi atau memperoleh pilihan. Berdasarkan arti etimologi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan dapat dipahami sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri atau mengontrol dirinya dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkannya (Bagus, 2005). Dalam hal ini, kebebasan tampak bahwa kebebasan lebih bermakna positif. Maksudnya, kebebasan dilihat sebagai konsekuensi dari adanya potensi alamiah manusia untuk berpikir, berpendapat, berkehendak dan bertindak dalam hidupnya. Selain itu, kebebasan juga dapat dipahami sebagai sebuah keadaan dimana tidak ada hambatan atau kekurangan dari luar yang

menghalangi manusia dalam bertindak. Dalam arti demikian, kebebasan lebih dipahami secara negatif (ketiadaan represi dari pihak luar) (Waskito, 2017).

Sejak lama, kebebasan cenderung dikaitkan dengan konteks sosial politik. Dalam konteks sosial politik, kebebasan dipandang sebagai keadaan kondusif di mana seseorang bebas melakukan sesuatu tanpa kekangan dari pihak lain. sejauh tidak membahayakan orang lain atau mengganggu kesejahteraan bersama, setiap orang bebas melakukan kegiatan dalam negara. Misalnya, berpartisipasi dalam tugas kenegaraan, aktif dalam sebuah partai politik tertentu, bebas mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan kemampuan dirinya dan bebas memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan merupakan hak alamiah yang tidak bisa diasingkan dari hidup manusia. Kebebasan adalah kondisi ideal yang selalu didambakan oleh setiap pribadi dalam sebuah negara. Negara yang baik adalah negara yang menjamin kebebasan individual warganya.

Konsep Kebebasan Manusia Menurut Spinoza

Dalam lanskap pemikiran Spinoza, sesuatu dikatakan bebas (*liber*) kalau itu berada dari keniscayaan alamiahnya dan ditentukan untuk bertindak oleh dirinya sendiri (Spinoza, 1981). Konsep ini menegaskan bahwa tindakan bebas lahir dari keniscayaan. Sesuatu dikatakan bebas kalau ia menyebabkan dirinya sendiri (*self-caused*). Dalam hal ini, hanya Allah yang bebas secara absolut karena Ia penyebab diri-Nya sendiri (*causa sui*). Semua hal terbatas di dunia ini tidak memiliki kebebasan absolut. Sebagai bagian dari alam yang merupakan hal-hal terbatas (*finite things*) manusia tentu sangat bergantung pada Allah. Dengan demikian, manusia tidak memiliki kebebasan. Konsep ini penting karena akan menjadi fondasi bagi Spinoza dalam menguraikan gagasannya tentang kebebasan manusia. Pertanyaannya di sini adalah apakah benar manusia tidak memiliki kebebasan? Pertanyaan ini bisa kita hubungkan dengan kemampuan istimewa yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh hal-hal terbatas lainnya yakni akal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu memikirkan yang terbaik untuk hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, Spinoza menjelaskan dalam *A Political Treatise* bahwa pikiran manusia diciptakan secara langsung oleh Allah (Benedict de Spinoza, 2007).

Konsekuensinya, manusia lebih bebas bila dibandingkan dengan hal-hal terbatas lainnya.

Dalam karya yang sama, Spinoza menegaskan; dalam pikirannya, manusia memiliki sebuah pengetahuan yang memadai tentang kekekalan dan keterbatasan Allah sehingga ia memiliki kekuatan untuk berpikir secara benar” (Spinoza, 2002). Hal ini menunjukkan keistimewaan manusia. Relasi yang erat dengan Allah ini membuat manusia bergantung kepada Allah. Akan tetapi, ketergantungan ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki kebebasan. Manusia tetap memiliki kebebasannya sebagai makhluk rasional. Berkat kemampuan akal budinya, manusia mengambil bagian dalam kebebasan Allah (Kisner, 2011). Hal penting yang perlu disadari di sini adalah kebebasan yang dimiliki manusia tidak absolut seperti kebebasan Allah sebab ia (manusia) tidak menyebabkan dirinya sendiri. Berkat tuntunan akal budinya, manusia bisa menentukan dirinya sendiri dan mengambil keputusan penting berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dan meningkatkan kekuatan di dalam dirinya sehingga ia bisa hidup. Kemampuan untuk mempertahankan diri ini disebut sebagai *conatus*. Dengan demikian, manusia memiliki kebebasan sejauh ia memiliki persatuan dengan Allah, sebab hanya Allahlah yang bebas secara absolut (Rika, 2019)

Kebebasan Sebagai Determinasi Diri

Spinoza melihat hubungan erat antara kebebasan manusia dengan rasionalitas. Bahkan ia menegaskan bahwa kebebasan itu tidak lain adalah hidup menurut tuntunan akal budi. Kebebasan adalah kodrat manusia. Ia bersumber dari dalam diri manusia untuk menentukan dirinya (*self-determination*). Dalam hal ini, manusia bisa menentukan dirinya sendiri apabila ia hidup di bawah tuntunan akal budinya. Dengan demikian, manusia yang mampu memaksimalkan kemampuan akal budinya akan mampu mengatur dirinya seturut nilai-nilai yang hendak digapainya. Ia bisa mengarahkan dirinya untuk menemukan apa yang terbaik dan menghindari apa yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Kebebasan yang dimiliki manusia merupakan sebuah fakultas untuk bertindak secara rasional. Maksudnya, Tindakan-tindakan manusia diarahkan untuk pertimbangan akal budi

(Waskito, 2017). Hal inidimungkinkan karena akal budi manusia merupakan bagian dari akal budi ilahi yang *notabene* memiliki kebebasan absolut. Karena adanya relasi ini, maka manusia berpartisipasi dalam kebebasan Allah. Singkatnya, manusia bisa menentukan dirinya karena akal budinya memiliki hubungan dengan akal budi Allah (Suseno, 1997).

Berdasarkan gagasan Spinoza di atas, kita menemukan bahwa kebebasan manusia itu praktis. Kebebasan itu bukan hanya memiliki sebanyak mungkin ide yang memadai tetapi juga mengikuti tuntunan akal budi dalam kehidupan sehari-hari yang mengarahkan manusia pada pencapaian kebahagiaan bersama orang lain. Karena itu, seseorang melakukan kekeliruan kalau ia mengatakan bahwa kebebasan itu hanya mencakup aktivitas intelektual, seperti kontemplasi, refleksi filosofis dan pencarian akan yang ilmiah. Walaupun aktivitas ini sangat penting untuk mengembangkan ide-ide yang memadai, kita juga hendaknya mengakui bahwa aktivitas tersebut memiliki hubungan dengan orang lain dalam sebuah kehidupan Bersama. Singkatnya, ide-ide memadai yang dimiliki manusia hendaknya menuntun tindakannya untuk berpartisipasi mengusahakan kebaikan bagi semua orang (*bonum commune*).

Kebebasan Dalam Hidup Bernegara

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran sesama dalam hidupnya. Karena itu, kebebasan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pihak lain dalam dunianya. Kemampuan manusia untuk memperoleh dan mengekspresikan kebebasan individual bergantung pada relasinya dengan pihak-pihak luar, termasuk kondisi politik dalam kehidupan bernegara.

Pemikiran Spinoza tentang kebebasan manusia tidak terlepas dari situasi politik di Belanda pada zamannya. Konsep kebebasan sebagai determinasi diri berakar pada sebuah tradisi kuno yakni Yunani (*eleutheria*) dan Romawi (*liber*) (Kisner, 2011). Kedua istilah ini pertama-tama merupakan terminology politik yang menjelaskan perbedaan antara seorang warga negara dan seorang budak. Warga negara hidup di bawah otoritasnya sendiri, sementara budak hidup di bawah otoritas orang lain (majikan). Warga negara memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan publik dan mempunyai harta milik pribadi. Dengan kata lain,

warga negara mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Sementara itu, seorang budak hanya bergantung pada tuannya dan tidak memiliki kebebasan. Dalam kehidupan bernegara, manusia bebas berbeda dengan manusia rakus atau yang diperbudak oleh keinginannya. Manusia bebas adalah seseorang yang hidup di bawah bimbingan akal budinya. Bisa dikatakan bahwa kebebasan merupakan kemenangan akal budi atas emosi-emosi yang berpeluang untuk menghancurkan kehidupan bersama, seperti hasrat untuk melakukan korupsi. Kemenangan akal budi ini dibuktikan melalui aktivitas yang berguna bagi kesejahteraan bersama, misalnya terlibat dalam tugas-tugas pemerintahan dan bertanggung jawab dengan tugas tersebut.

Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan yang Terbaik

Di setiap negara pasti ada sistem pemerintahan tertentu. Menurut Spinoza, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan kebebasan manusia. Selain itu, di dalam demokrasi para warga negara dengan bebas berpartisipasi aktif dalam membangun negara. Demokrasi juga bertujuan untuk menghindari keinginan yang irasional dan menuntun manusia sebisa mungkin agar hidup di bawah tuntunan akal budi sehingga mampu hidup dalam damai dan penuh harmoni (Dedi Agus, 2021). Singkatnya, di dalam demokrasi kebebasan manusia untuk mengekspresikan dirinya sebagai makhluk rasional dijamin. Terkait demokrasi, Spinoza mengatakan;

“Tujuan dasar demokrasi adalah menghindari keinginan yang irasional dan membawa manusia sejauh mungkin agar hidup di bawah tuntunan akal budi sehingga mereka bisa hidup dalam damai dan harmonis. Demokrasi juga adalah sistem pemerintahan yang paling natural dan paling sesuai dengan kebebasan manusia. Di dalam demokrasi, seseorang tidak memberikan hak naturalnya secara absolut. Ia hanya memberikannya bersama-sama dengan masyarakat. Karena itu, semua manusia tetap sama sebagaimana ketika mereka berada dalam kondisi alamiah (*state of nature*) (Benedict de Spinoza, 1951).

Konsep Spinoza mengenai demokrasi mempunyai hubungan erat dengan pandangan paling mendasarnya tentang determinasi diri. Sistem pemerintahan demokrasi membuka kesempatan kepada setiap pribadi untuk bersama-sama menentukan perkembangan masyarakat dan aturan dalam hidup bersama dan sebagai konsekuensinya adalah menentukan (mendeterminasi) diri mereka sendiri.

Demokrasi merupakan sistem politik yang paling baik karena percaya pada kekuatan banyak orang yang bisa memperkokoh kesatuan dan menjamin kesejahteraan banyak orang. Selain itu, di dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang memadai untuk mempengaruhi proses pembuatan hukum. Dengan demikian, pembuatan hukum bukan monopoli orang-orang tertentu. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan hukum bermaksud agar hukum atau aturan negara tersebut sungguh-sungguh berguna bagi kepentingan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dalam negara demokrasi lebih bebas (seperti dalam *state of nature*) daripada orang-orang yang hidup di dalam sistem pemerintahan lainnya.

Partisipasi warga negara dalam proses demokrasi di dalam sebuah negara akan terwujud ketika kebebasan berpikir, berbicara dan beragama dijamin. Melalui kebebasan tersebut, setiap pribadi mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk rasional. Ia berjuang untuk menentukan dirinya, mengontrol hidupnya sesuai tuntunan akal budi dan demi mencapai kebahagiaan hidupnya.

Relevansi Konsep Kebebasan Manusia menurut Spinoza Bagi Indonesia

Konsep kebebasan manusia dalam perspektif filsafat Politik Baruch Spinoza bertitik tolak pada keyakinan bahwa manusia hanya benar-benar bebas ketika ia bertindak berdasarkan akal budinya, dan bukan oleh keinginan (hasrat) yang kacau dan irasional. Dalam konteks politik Indonesia, penulis melihat bahwa gagasan ini sangat relevan khususnya dalam memperkuat kualitas demokrasi yang seringkali dihindangi oleh politik identitas, disinformasi serta mobilisasi emosional (Wingarta et al, 2021). Di muka, Spinoza menekankan bahwa kebebasan tidak identik dengan melakukan apa pun yang diinginkan, melainkan kemampuan memahami kenyataan dengan jernih dan bertindak secara rasional. Dengan demikian, kehidupan politik Indonesia membutuhkan ruang edukasi publik, literasi politik, dan penguatan nalar kolektif agar warga dapat menentukan pilihan tanpa tekanan afektif yang destruktif. Lebih jauh, Spinoza mengajarkan bahwa negara yang baik adalah negara yang menjamin kebebasan berpikir dan berbicara bagi setiap warganya. Prinsip ini relevan dengan dinamika Indonesia yang masih berjuang menyeimbangkan keamanan nasional dengan kebebasan sipil. Dalam beberapa kasus, regulasi

mengenai informasi digital, ujaran kebencian, atau kritik terhadap pemerintah dapat berpotensi disalahgunakan untuk membungkam oposisi. Perspektif Spinoza mengingatkan bahwa pembatasan kebebasan berpikir justru melemahkan negara, karena negara yang kuat adalah negara yang warga-warganya mampu berpikir bebas dan rasional. Dengan kebebasan tersebut, kritik dapat menjadi sarana koreksi dan perbaikan pemerintahan.

Pada akhirnya, penulis menarik benang merah dari gagasan yang ditelurkan Spinoza bahwa tujuan utama negara adalah *pax* (kedamaian) dan *securitas* (rasa aman) memberikan landasan filosofis bagi penguatan politik Indonesia yang inklusif dan konstitusional. Kedamaian menurut Spinoza bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan kondisi di mana warga dapat menjalani hidup dengan aman, mengekspresikan pikiran, serta berpartisipasi tanpa intimidasi. Hal ini relevan dalam upaya politik di Indonesia dalam mencegah radikalisme, intoleransi, dan kekerasan politik, sembari tetap menghormati kebebasan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Spinoza membantu merumuskan orientasi politik Indonesia yang menyeimbangkan keamanan, kebebasan berpikir, rasionalitas publik, dan keadilan sosial sebagai fondasi demokrasi yang matang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan dalam pemikiran Spinoza menegaskan bahwa otonomi manusia berakar pada kemampuan bertindak berdasarkan rasionalitas dan pemahaman yang memadai, sehingga kebebasan tidak dipahami sebagai ketiadaan batas eksternal melainkan sebagai determinasi diri yang selaras dengan tatanan kausalitas dan kehidupan bersama. Implikasi konseptual ini menunjukkan bahwa tatanan politik yang menjamin ruang bagi penggunaan akal budi—terutama dalam sistem demokrasi—menjadi prasyarat bagi terwujudnya kebebasan yang autentik sekaligus berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Kontribusi kajian ini terletak pada penegasan relasi inheren antara kebebasan rasional dan struktur politik, yang dapat digunakan sebagai kerangka reflektif dalam membaca dinamika kebebasan dalam kehidupan sosial-politik kontemporer. Keterbatasan kajian ini berada pada fokus analisis yang bertumpu pada telaah tekstual filosofis tanpa eksplorasi empiris, sehingga penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan

pendekatan interdisipliner yang menguji relevansi konsep kebebasan rasional dalam praktik politik konkret serta membandingkannya dengan pemikiran filsuf lain guna memperkaya pengembangan teori dan aplikasinya.

DAFTAR REFERENSI

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 2005, 406*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Benedict de Spinoza. *A Political Treatise*. Diterj oleh R. H. M. Elwes. New York: Dover Publications, 1951.
- . *A Theologico-Political Treatise*. Diterj oleh Jonathan. Israel: Cambridge University Press, 2007.
- Binsasi, Norbertus A. "Filsafat Spinoza dan Penerimaan Supomo: Studi Tentang Awal Pembentukan Negara Indonesia Merdeka," 2024.
- Dedi Agus. "Implementasi Prinsip - Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal MODERAT* 7, no. 1 (2021): 2.
- Dinata, Syaiful. "Pembentukan kepribadian manusia." *Kanz Philosophia* 8, no. 2 (2022): 107–30.
<https://journal.sadra.ac.id/ojs/index.php/kanz/article/download/184/169>.
- Dister, Nico Syukur. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Frans Magnis Suseno. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, dan Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.
- Khoirul Anwar. "Kebebasan Manusia Berdasarkan Filsafat Khudi (Ego/Diri) Muhammad Iqbal." *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 9, no. 2 (2015).
- Kisner, Matthew J. *Spinoza on Human Freedom*. New York: Cambridge University Press, 2011.
- Leahy, Louis. *Siapakah Manusia: Sintesis filosofis tentang Manusia*. Yogyakarta:

Kanisius, 2001.

Raharjo, Muhammad Agung, Andi Aderus, dan Hamzah Harun. "Kebebasan Manusia dalam Berkehendak dan Berbuat : Analisis Persoalan Klasik dalam Konteks Kehidupan Berbangsa di Indonesia." *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 203–15.

Rika. "Substansi dalam Perspektif Spinoza." *PARADIGMA: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1, no. 1 (2019): 44–55.

Riyanto, Armada. *Filsafat Politik*. Malang: STFT Widya Sasana Publication, 2007.
Simon P. L. Tjahjadi. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Spinoza, Baruch. *Cours*. Diterj oleh Gilles Deleuze. Israel, 1981.

———. *Ethics*. Diterj oleh Michael L. Morgan. Indiana Polis: Hackett Publishing Company, 2002.

Steven B. Smith. *Freedom and Redemption in Ethics*. London: Yale University Press., 2006.

Szlajen, Fernando. *Freedom in Spinoza's Philosophy*. Netherland: Mekorot Foundation., 2003.

Valentinus. *Filsafat Modern*. Malang: Widya Sasana Publication, 2011.

Waskito, Ryan Haryo. "Konsep Kebebasan Manusia dalam Pandangan Karl Jaspers." *Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 2017, 91–103. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28736/#:~:text=>